

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kursus Kewirausahaan Kota (KWK)

1. Tinjauan Tentang Kursus

a. Pengertian Kursus

Kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat atau kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap mental bagi warga belajar. Kursus sebagai salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah tugas kelembagaan untuk merealisasikan tujuan pendidikan luar sekolah. Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah, Pasal 2, ayat 1, yaitu “ melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya”(Sihombing, 2001 :89).

Sejalan dengan tujuan pendidikan luar sekolah maka tujuan penyelenggaraan kursus adalah (1) memperluas keikutsertaan masyarakat dalam pemerataan kesempatan belajar, (2) meningkatkan mutu masyarakat melalui pendidikan, (3) meningkatkan proses belajar mengajar untuk mencapai dayaguna dan hasil guna yang optimal, (4) mempersiapkan warga belajar untuk mengembangkan diri pribadinya atau untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih besar (Sihombing, 2001 :89).

Beberapa literatur menyebutkan bahwa Kursus didefinisikan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah,

Pemuda, dan Olahraga (Kepdirjen Diklusepora) Nomor: KEP-105/E/L/1990 sebagai berikut:

Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa kursus didefinisikan adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer bahwa kursus adalah pengajaran mengenai kemahiran, kepandaian, keahlian, pengetahuan, dan sebagiannya dalam waktu singkat.

Menurut pendapat para ahli yang diatas dapat disimpulkan bahwa definisi kursus adalah pelayanan warga belajar yang berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap mental, keahlian, dan kemahiran yang dapat dimanfaatkan bagi meningkatkan mutu kehidupan dan menjadi bekal mencari nafkah serta dapat dimanfaat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam waktu yang singkat.

b. Karakteristik Kursus

Sihombing (2001:90-91) secara teknis operasional kursus yang diselenggarakan masyarakat yang mendasari program pembelajarannya atas kebutuhan dan keinginan masyarakat dan pasar

tenaga kerja, atau sering disebut dengan permintaan masyarakat karakteristik kursus adalah:

- 1) Isi dan tujuan pendidikannya selalu berorientasi langsung pada hal-hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan masyarakat sesuai dengan keadaan sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan dan menurut keperluan, situasi dan kondisi setempat
- 2) Metode penyajian yang digunakan disesuaikan dengan kondisi warga belajar dan situasi setempat
- 3) Program dan isi pendidikannya dapat lebih efektif dan efisien untuk berbagai pengetahuan fungsional yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan untuk pembentukan dan perkembangan pribadi
- 4) Usia warga belajarnya tidak dibatasi atau tidak perlu sama pada suatu jenis atau jenjang pendidikan
- 5) Jenis kelamin warga belajarnya tidak dibedakan untuk suatu jenis dan jenjang pendidikan, kecuali bila kemampuan fisik, mental, tradisi atau sikapnya dan lingkungan sosial tidak mengizinkan
- 6) Ijazah pendidikan sekolah tidak selalu menentukan terutama dalam penerimaan warga belajar
- 7) Jumlah warga belajar dalam suatu kelompok belajar tidak terbatas, dari individu sampai massa tergantung pada isi program yang dilaksanakan
- 8) Jangka waktu belajar disesuaikan dengan keperluan dan tidak terlalu terikat pada prosedur yang ketat
- 9) Syarat dan formasi minimal tenaga fasilitator/tenaga pendidik tidak terlalu ketat
- 10) Tidak diperlukan fasilitas yang mewah dan terlalu ketat persyaratannya
- 11) Dapat diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, atau badan hukum
- 12) Dapat diberikan secara lisan atau tertulis
- 13) Hasil pendidikannya dapat dimanfaatkan didalam kehidupan sehari-hari
- 14) Dapat mencakup sebagian besar populasi

c. Penyelenggaraan Kursus

Pembinaan terhadap lembaga kursus berarti membantu merencanakan, mengatur, mengawasi, dalam usaha meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan pendidikan luar

sekolah yang diselenggarakan kursus Diklusemas. Ada beberapa tujuan pembinaan kursus antara lain :

- 1) Menyamakan pola pikir dan tindak dalam menjawab tantangan yang ada dengan berpedoman pada aturan yang berlaku;
- 2) Meningkatkan system administrasi kursus;
- 3) Meningkatkan kemampuan professional dari para tenaga pengajar ;
- 4) Meningkatkan proses pembelajaran untuk mencapai dayaguna dan hasilguna secara optimal;
- 5) Meningkatkan mutu lulusan peserta kursus dengan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan pasar ;
- 6) Memperluas keikutsertaan masyarakat dalam rangka turut memeratakan kesempatan belajar dan meningkatkan mutu warga belajar (Sihombing, 2001: 93-94).

Tugas dan fungsi pembinaan tersebut dilakukan aparat pemerintah yang bertugas di bidang pendidikan luar sekolah, himpunan penyelenggaran kursus, himpunan sumber belajar dan penguji dan organisasi-organisasi yang bergerak dibidang pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pengusaha atau industri, pengguna lulusan kursus, dan pihak lain yang terkait. Upaya pembinaan dan pengembangan kursus diarahkan untuk memperkuat kemampuan lembaga kursus dalam memberikan pelayanan berbagai kursus ketrampilan/kejuruan bagi masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, atau melanjutkan ke tingkat/jenjang yang lebih tinggi. Pokok- pokok program pembinaan dan pengembangan kursus antara lain, meliputi: 1) penataan perizinan lembaga kursus, 2) penyusunan dan pengembangan kurikulum, 3) penataan ujian nasional,

4) program standarisasi, 5) pengembangan ketenagaan, 7) program kerjasama lintas-sektoral di berbagai bidang pembangunan.

2. Tinjauan tentang Kewirausahaan

a. Pengertian Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah suatu kata yang sering digunakan untuk terjemahan dari kata “*enterpreunership*”. Kata *enterpreunership* atau kewirausahaan dianggap sebagai salah satu fungsi ekonomi karena dari semangat untuk berwirausaha hingga menjadi wirausaha baru kemudian menjadi wirausaha yang sesungguhnya sangat krusial dengan kontribusi terhadap pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat (Nugroho, 2006 :23).

Menurut Peter F. Drucker Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan Sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan Menurut Zimmerer Kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha) (Dalam buku Kasmir, 2006 :17).

Kewirausahaan adalah kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan jiwa kewirausahaan yang harus dikuasai dan dimiliki peserta didik, yang diharapkan mampu membangun usaha sendiri atau kelompok (Dikmas, 2011 :3).

Secara epistemologi, kewirausahaan merupakan suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau suatu proses dalam

mengerjakan sesuatu yang baru ada berbeda. Konteks bahasa Indonesia, kewirausahaan berasal dari kata *wira* yang berarti berani, gagah, utama atau perkasa dan *usaha* yang berarti perbuatan yang dilakukan untuk mencapai keinginan atau tujuan. Kata lain, kewirausahaan adalah pola tingkah laku manusia yang gagah dan berani untuk mencapai suatu keinginan atau tujuan (Syamsuddin dan Ramdani, 2008 :7).

Kewirausahaan merupakan segala sesuatu hal yang menyangkut teknik, metode, sistem serta berbagai strategi bisnis umum yang dapat dipelajari tentang sukses atau mundurnya seorang wirausaha (Subanar, 2001:10).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu proses kreativitas dan inovasi yang mencakup pengetahuan, ketrampilan yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan dan berguna bagi dirinya dan orang lain.

b. Tujuan Kewirausahaan

Kewirausahaan memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menumbuhkan kembangkan jumlah wiusahawan yang berkualitas
2. Meningkatkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat
3. Mewujudkan kemampun dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat
4. Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan dikalangan masyarakat (Sunyoto, 2009:2).

Menurut Petunjuk teknis 2011 tentang Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM). Tujuan pendidikan Kewirausahaan Masyarakat yaitu :

- 1) Menanamkan jiwa, sikap, dan etika wirausaha kepada peserta didik
- 2) Memberikan bekal pengetahuan tentang kewirausahaan kepada peserta didik
- 3) Memberi bekal ketrampilan di bidang produksi barang/ jasa kepada peserta didik
- 4) Melatih ketrampilan berwirausaha kepada peserta didik melalui praktik berwirausaha.

c. Sasaran Kewirausahaan

Menurut Sunyoto dan Wahyuningsih (2003) sasaran kewirausahaan meliputi :

- 1) Instansi pemerintah dengan kegiatan usaha (BUMN) organisasi profesi dan kelompok masyarakat
- 2) Pelaku ekonomi yang terdiri dari pengusaha kecil dan koperasi
- 3) Generasi muda, anak-anak putus sekolah dan calon wirausaha

d. Asas Kewirausahaan

Asas kewirausahaan merupakan syarat dalam melakukan suatu wirausaha dan menjadi calon wiraswasta yang baik. Asas Kewirausahaan antara lain:

1. Kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis, termasuk keberanian mengambil risiko
2. Kemampuan bekerja secara tekun, teliti dan produktif
3. Kemampuan berkarya dengan sangat kemandirian
4. Kemampuan berkarya dalam kebersamaan dan etika bisnis yang sehat (Sunyoto&Wahyuningsih, 2003: 3)

e. Manfaat Kewirausahaan

Menurut Sunyoto dan Wahyuningsih (2003) manfaat kewirausahaan meliputi :

1. Menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran
2. Sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemerliharaan lingkungan dan kesejahteraan
3. Memberi contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun dan memiliki pribadi unggul yang paatut diteladani
4. Berusaha mendidik para karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaan
5. Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin bekerja keras dalam berinovasi dan kreatif dalam mengurangi pengangguran sehingga dapat mensejahterakan dirinya maupun orang lain.

3. Tinjauan Tentang Kota

a. Pengertian Kota

Secara umum kota merupakan tempat bermukimnya warga, tempat bekerja, tempat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan pusat kegiatan lainnya yang telah mengalami banyak kemajuan pembangunan (Wardiyatmoko, 1996 :15).

Kota dapat diartikan sebagai suatu daerah yang memiliki gejala pemusatan penduduk yang merupakan suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, kultural, yang terdapat di daerah tersebut dengan daerah-daerah

lainnya. Selain itu kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk dan diwarnai dengan strata sosial, ekonomi, yang heterogen dan berorientasi pada materialistik (Mujiharto dkk, 2007:103).

Menurut Bintarto dari segi geografi, kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan coraknya yang materialistik, atau dapat pula diartikan sebagai bentang-bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistik dibandingkan dengan daerah belakangnya (Bintarto, 1989:36).

Selain itu menurut Bintarto mengartikan kota adalah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistik dibanding dengan daerah belakangnya (Marah Uli, 2006:70).

Kota merupakan tempat yang dipandang dan dirasakan dari berbagai sudut pandang, yang menggambarkan keaktifan, keberagaman, dan kompleksitasnya (Melville, 1995:51).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dirumuskan intisari, pengertian kota yaitu :

- 1) Kota sebagai tempat bermukimannya warga, tempat bekerja, tempat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan pusat kegiatan lainnya
- 2) Kota sebagai perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, kultural
- 3) Kota sebagai sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan coraknya yang materilistic
- 4) Kota sebagai keaktifan, keberagaman, dan kompleksitas.

b. Ciri-ciri Kota

Menentukan suatu wilayah merupakan wilayah kota atau bukan, maka dapat digunakan beberapa ciri berikut ini :

- 1) Tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan
Pasar dan pertokoan merupakan salah satu pusat aktivitas penduduk diperkotaan. Pasar dan pertokoan dikota-kota besar masuk dalam wilayah pusat bersama dengan gedung perkantoran, bioskop, bank, dll
- 2) Tempat-tempat untuk parkir
Tempat parkir merupakan ciri lainnya dari kota
- 3) Tempat rekreasi dan olahraga
Tempat rekreasi dan olahraga merupakan kebutuhan bagi masyarakat, terutama masyarakat kota (Marah Uli, 2006: 70).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kota dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu tempat untuk pasar dan pertokoan, tempat untuk parkir dan tempat untuk rekreasi dan olahraga. Tempat tersebut digunakan untuk membedakan wilayah kota atau bukan dengan adanya pembagian tempat.

c. Ciri-ciri Masyarakat Kota

Ciri-ciri masyarakat kota adalah :

- 1) Masyarakat kota mempunyai sifat individualistis yaitu tidak adanya sikap kebersamaan, hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain dan egois
- 2) Masyarakat kota mempunyai sifat heterogenitas sosial yaitu adanya perbedaan yang beraneka ragam dalam kehidupan masyarakat kota, seperti mata pencaharian dan agama
- 3) Masyarakat kota mempunyai sifat materilistis yaitu suatu sikap dimana segala sesuatu diukur berdasarkan uang
- 4) Masyarakat kota mempunyai pola pikir yang rasionalisme yaitu sikap yang terbuka (open) terhadap hal-hal yang baru, seperti IPTEK dan budaya
- 5) Masyarakat kota mempunyai *gesellschaft* yaitu hubungan kekerabatan atau sosial yang terbatas pada hubungan fungsional, misalnya hubungan rekan kerja
- 6) Norma-norma agama tidak begitu diperhatikan (Marah Uli, 2006: 105).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri masyarakat kota adalah masyarakat kota cenderung individualistis, heterogenitas sosial, materilistis, pola pikir yang rasionalisme. Ciri tersebut sangat bertolak belakang dengan masyarakat diluar wilayah kota atau perdesaan yang masih ada rasa kekerabatan antar warga masyarakat lainnya.

d. Potensi Kota

Potensi kota yang dapat dikembangkan antara lain adalah ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang dapat dicontohkan dibawah ini :

- 1) Potensi ekonomi
Kota menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kota dan didaerah diluar kota, seperti pasar, bank, terminal, mall, stasiun, dll

2) Potensi sosial

Kota menyediakan fasilitas-fasilitas yang menciptakan keserasian dan ketengangan hidup masyarakat kota, seperti rumah sakit, puskesmas, kamar bersalin, pemadam kebakaran, dll

3) Potensi politik

Kota menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat menentramkan hidup masyarakat kota, seperti aparatur kota, polisi, hakim, camat, bupati, dll

4) Potensi budaya

Kota menyediakan fasilitas-fasilitas yang memajukan kehidupan masyarakat kota, seperti sarana dan prasarana, pendidikan, olahraga, rekreasi, dan kesenian (Marah Uli, 2006: 107).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa potensi kota dibagi menjadi 4 (empat) yaitu: potensi ekonomi, sosial, politik dan budaya dari potensi yang ada di kota dapat dikembangkan sebagai menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat kota sendiri.

4. Tinjauan Tentang Kursus Kewirausahaan Kota (KWK)

a. Pengertian KWK

Kursus Kewirausahaan Kota (KWK) adalah program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat dibidang usaha yang berspektrum perkotaan guna memperoleh pengetahuan, keterampilan, menumbuh kembangkan sikap mental berwirausahaan, dalam mengelola diri dari lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan berusaha untuk peningkatan kualitas hidupnya (Kemendiknas, 2010).

Program KWK melalui penjabar setiap kalimat kursus kewirausahaan kota dapat disimpulkan yaitu pelayanan warga belajar

pada pendidikan non formal yang diadakan di kota yang merupakan tempat bermukimannya warga, tempat bekerja, tempat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan dan pusat kegiatan lainnya yang berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap mental, keahlian, dan kemahiran yang dapat dimanfaatkan bagi meningkatkan mutu kehidupan dan menjadi bekal mencari nafkah dan sebagai proses kreativitas dan inovasi yang berguna bagi dirinya dan orang lain.

b. Tujuan KWK

Tujuan dari program KWK adalah

- 1) Untuk mengurangi pengangguran di perkotaan sekaligus menekan masalah sosial dengan mengoptimalkan potensi yang ada pada masyarakat
- 2) Mengentaskan kemiskinan yang ada di perkotaan
- 3) Menciptakan lapangan pekerjaan (Kemendiknas, 2010).

c. Dasar Hukum KWK

Penyelenggaraan program KWK memiliki dasar hukum yang mengatur program tersebut antara lain :

- 1) Undang-undang No. 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan Pendidikan Nonformal
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 31 tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal
- 5) Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal tahun 2009

d. Sasaran KWK

Perlu dipikirkan siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran dari program KWK. Kriteria sasaran (peserta didik) dalam program KWK yaitu:

- 1) Penduduk usia produktif (18-35 tahun)
- 2) Menganggur
- 3) Mempunyai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung
- 4) Prioritas berdomisili tidak jauh dari tempat penyelenggaraan program kursus kewirausahaan kota
- 5) Tidak dalam proses masih sekolah
- 6) Diprioritaskan dari keluarga tidak mampu (Kemendiknas, 2010 : 3)

Untuk itu sasaran program KWK ini diperuntukkan bagi warga masyarakat yang usia produktif dan tidak sedang proses sekolah serta program ini bagi mereka yang tidak mampu agar dalam pelaksanaan program KWK tersebut mendapat hasil yang maksimal bagi kehidupan warga masyarakat yang mengikuti program KWK.

B. Tinjauan Tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

1. Pengertian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Program pendidikan non formal dilaksanakan pada tempat yang disediakan oleh masyarakat yang memungkinkan untuk melaksanakan proses belajar. Tempat kegiatan belajar menampung berbagai program layanan pendidikan non formal dinamakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang pengelolanya dilakukan oleh masyarakat, sendiri. Melalui program pembelajaran di PKBM pendidikan non formal berusaha untuk memberdayakan masyarakat sebagai wujud keikutsertaan

dalam penyiapan sumber daya manusia yang berdaya saing (Sihombing, 2000: 6).

PKBM adalah suatu wadah diberbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan dibidang sosial, ekonomi dan budaya. PKBM dibentuk oleh masyarakat merupakan milik masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat.

PKBM merupakan suatu tempat kegiatan pembelajaran masyarakat yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar dan potensi masyarakat dalam mencapai kemajuan pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya (Sudjana 2003 : 2).

PKBM sebagai institusi pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat dan wadah pembelajaran dan oleh masyarakat disebut fleksibel karena ada peluang bagi masyarakat untuk belajar apa saja yang masyarakat butuhkan.

Depdiknas (Dikmas) berperan memfasilitasi, sedangkan prakarsa ada dimasyarakat itu sendiri. Menurut Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991, antara lain menyatakan bahwa :

Pendidikan Non Formal (PNF) /PLS adalah pendidikan yang dilaksanakan diluar sekolah baik diselenggarakan maupun yang belum dilembagakan, berjenjang atau tidak berjenjang, berkesinambungan atau tidak berkesinambungan dalam menunjang pendidikan sepanjang hayat.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dirumuskan intisari pengertian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yaitu :

- 1) PKBM sebagai wadah diberbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi
- 2) PKBM sebagai tempat kegiatan pembelajaran masyarakat yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, ekonomi, dan sosial

2. Tujuan PKBM

Menurut Sihombing Umberto (1999) hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan tujuan PKBM, yaitu :

- 1) Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah yang diarahkan pada keswadayaan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk mengembangkan perekonomian keluarga dan masyarakat
- 2) PKBM mengembangkan program serta melibatkan dan memanfaatkan potensi masyarakat
- 3) Potensi yang ada dimasyarakat yang selama ini tidak tergali akan dapat digali, ditumbuhkan dan dimanfaatkan melalui pendekatan persuasif
- 4) Program yang dilakukan diarahkan pada pengembangan pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga
- 5) Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi.

Secara umum PKBM dibentuk dengan tujuan pembelajaran warga belajar agar mereka memiliki ketrampilan, pengetahuan dan sikap dengan melakukan 3 (tiga) kegiatan yaitu melayani, membina, dan memenuhi kebutuhan warga belajar pada intinya adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM).

3. Fungsi PKBM

PKBM sebagai salah satu wahana pendidikan nonformal mempunyai fungsi yaitu :

- a. Fungsi Utama
Sebagai wadah berbagai kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan masyarakat.
- b. Fungsi Pendukung
 - 1) Sebagai Pusat Informasi:
 - 2) Bagi masyarakat sekitar, berkenaan dengan sumber daya dari dalam maupun dari luar yang dapat didayagunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran, program kegiatan yang diluncurkan ke daerahnya, dan informasi umum lainnya.
 - 3) Bagi lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang berkepentingan pada pembangunan masyarakat, berkenaan dengan: sumberdaya potensial berikut masalah/kebutuhan untuk peluncuran program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pembelajaran masyarakat.
 - 4) Pusat jaringan informasi dan kerjasama bagi lembaga yang ada di masyarakat (lokal) dan lembaga di luar masyarakat
 - 5) Sebagai tempat koordinasi, konsultasi, komunikasi dan bermusyawarah para Pembina teknis, tokoh masyarakat dan para pemuka agama untuk merencanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
 - 6) Sebagai tempat kegiatan penyebarluasan program dan teknologi tepat guna (Annur, 2011:4)

PKBM merupakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dikelola oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan bukan milik pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di masyarakat.

4. Ciri-ciri PKBM berbasis masyarakat

- 1) Inisiatif pembentukan dari masyarakat
- 2) Pengelolaan penyelenggaraan program dilakukan oleh masyarakat
- 3) Perencanaan dan penetapan program bertitik tolak dari pengalaman-pengalaman yang ada dimasyarakat

- 4) Penyelenggaraan program diutamakan mendayagunakan potensi dan sumber daya masyarakat
- 5) Pembiayaan diusahakan dari sumber yang ada dimasyarakat
- 6) Tujuan strategis dan sesuai kesepakatan masyarakat
- 7) Melibatkan lembaga pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan program kegiatannya
- 8) Memberikan layanan pendidikan baik individu maupun kelompok
- 9) Penyelenggaraa program berdasarkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 10) Memiliki fasilitator atau pendamping
- 11) Tersedianya tempat dan sarana belajar
- 12) Tersedianya tempat informasi dan dokumentasi (Annur, 2011:3)

PKBM merupakan pusat kegiatan belajar masyarakat, yang dikelola oleh masyarakat untuk melayani pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya sedini mungkin. PKBM sebagai wadah kegiatan akan pendidikan nonformal.

C. Tinjauan Tentang Kesejahteraan Keluarga

1. Pengertian Kesejahteraan Keluarga

Menurut Ahid (2010: 61-62) keluarga didefinisikan sebagai berikut:

Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama yang dikenal oleh anak, umat kecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya.

Menurut kamus istilah pekerjaan sosial keluarga didefinisikan sebagai bagian yang terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekelompok manusia yang hidup bersama dengan adanya ikatan perkawinan hubungan darah atau adopsi.

Menurut UU No.10 tahun 1992 pasal 1 ayat 11 tentang keluarga sejahtera adalah sebagai berikut :

“Keluarga sejahtera ialah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup materil dan spiritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan keluarga masyarakat dan lingkungan”.

Tingkat kesejahteraan sosial suatu keluarga dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik yang ada di dalam maupun yang datang dari luar lingkungan keluarga yang bersangkutan.

Faktor internal yang memerlukan tingkat kesejahteraan suatu keluarga antara lain adalah : kondisi kesehatan, tingkat pendidikan ilmu pengetahuan, ketrampilan, penguasaan teknologi, kemampuan ekonomi dan lain-lain. Faktor eksternal dapat berupa struktur sosial ekonomi, fasilitas pendidikan, produksi dan konsumsi, transportasi dan komunikasi yang dapat mendukung bagi upaya memenuhi kesejahteraan keluarganya (BKKBN, 1994:18-21).

Sejahtera adalah suatu keadaan yang meliputi rasa aman, tentram lahir dan batin karena merasa sebagian besar kebutuhan tercapai (Nurliafarida, 2009 :1). Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram (Depdiknas, 2001:1011)

Menurut Selo Sumardjan dalam Hatmaji (1993) keluarga merupakan institusi perantara (mediator) antara individu dengan masyarakat.

Keluarga adalah suatu unit dalam masyarakat setiap anggotanya menghendaki terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera yang didalamnya terjadi keharmonisan dalam berinteraksi antara sesama anggota keluarga.

Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kernaifan lahiriah dan kepuasan batiniah serta mampu berperan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat keduanya tidak dapat dipisahkan, karena disamping individu yang anggota dari suatu keluarga dan masyarakat dimana dia berada.

Membangun keluarga sejahtera yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Keluarga sejahtera mengandung pengertian sebuah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang sama, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, bukanlah persoalan yang mudah. Kendala-kendala untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga, lebih banyak mempunyai muatan kualitatif akan senantiasa muncul, baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun internal institusi keluarga itu sendiri.

Adanya keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada individu anggota keluarga dalam berbagai dimensinya, serta semakin kecilnya

akses dan kemampuan untuk menguasai sumber daya yang ada dilingkungan, merupakan faktor-faktor yang harus turut diperhitungkan. Kondisi geografis, sosial, dan kultural yang melingkupi kehidupan keluarga dimana keluarga itu tinggal, sangat berpengaruh terhadap penilaiannya mengenai kesejahteraan keluarga.

2. Karakteristik Keluarga Sejahtera

Secara konseptual, keluarga sejahtera bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga yang tinggi. Kemandirian keluarga yang dimaksud adalah sikap mental dalam hal berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan, mendewasakan usia perkawinan, membina dan meningkatkan ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan mengembangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga, berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir maupun kebahagiaan batin (Bab I Pasal 1 ayat (14) dan (15) UU No. 10 Tahun 1992). Secara operasional, keluarga sejahtera berkarakteristik keluarga yang dapat melaksanakan fungsi-fungsi keluarga. Fungsi-fungsi keluarga tersebut menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan Keluarga Sejahtera Bab II Pasal 4 Ayat (2), terdiri dari 8 macam.

Kedelapan fungsi keluarga tersebut adalah fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan.

a. Fungsi Keagamaan

Dalam keluarga sejahtera, keluarga dan anggotanya mau dan mampu mengembangkan kehidupan sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, yang akan menjadikan dirinya sebagai insane-insan yang agamis, penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Fungsi Sosial Budaya

Terkait dengan fungsi ini, keluarga selalu memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan

c. Fungsi Cinta Kasih

Dalam keluarga yang sejahtera, keluarga akan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama berseminya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

d. Fungsi Melindungi

Keluarga yang sejahtera akan ditandai oleh kemampuannya dalam menumbuhkan rasa aman dan kehangatan bagi seluruh anggota-anggotanya.

e. Fungsi Reproduksi

Keluarga sejahtera dapat melaksanakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan sesuai dengan rencana dan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Dalam hubungannya dengan fungsi ini, keluarga sejahtera memiliki karakteristik suami isteri dapat mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupan di masa depan

g. Fungsi Ekonomi

Keluarga yang sejahtera akan selalu dapat mengembangkan kemampuan ekonominya

h. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Keluarga yang sejahtera akan terlihat mampu menciptakan lingkungan hidup baik fisik maupun non fisik yang sejuk, sehat, dan penuh dengan kenyamanan (latif, 2007 :19-23).

3. Klasifikasi Keluarga Sejahtera

Kesejahteraan bukan merupakan fenomena ekonomi semata, tetapi lebih fenomena sosio-budaya, dimana nilai-nilai interaksi sosial yang berlangsung lebih menentukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Konsep sejahtera dirumuskan lebih luas daripada sekedar definisi kemakmuran atau kebahagiaan. Konsep sejahtera tidak hanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan fisik orang ataupun keluarga sebagai entitas, tetapi juga harus dipenuhi adalah kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan pengembangan. Pembangunan keluarga sejahtera mencakup 23 (dua puluh tiga) variable seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, agama, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan, transportasi, tabungan, informasi dan peranan dalam masyarakat oleh karena itu, BKKBN menetapkan 5 (lima) tahapan keluarga sejahtera menurut pemenuhan kebutuhan, yaitu: pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III, dan sejahtera III plus. Lima tahapan keluarga tersebut diuraikan seperti dibawah ini :

a. Keluarga pra sejahtera

Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan.

b. Keluarga sejahtera tahap I

Adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu:

- 1) Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga
- 2) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari/lebih
- 3) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan berpergian
- 4) Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
- 5) Bila anak sakit/pasangan usia subur ingin berkeluarga berencana kesarana/petugas kesehatan

c. Keluarga sejahtera tahap II

Yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis yaitu :

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur
- 2) Paling kurang, seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk
- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun
- 4) Luas lantai rumah paling kurang 8 (delapan) meterpersegi tiap penghuni rumah

- 5) Seluruh anggota keluarga dalam 3 (tiga) bulan terakhir dalam keadaan sehat
- 6) Paling kurang orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap
- 7) Seluruh anggota yang berumur 10-60 tahun biasa membaca tulisan latin
- 8) Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini

d. Keluarga sejahtera tahap III

Yaitu keluarga yang memenuhi syarat pengembangan keluarga.

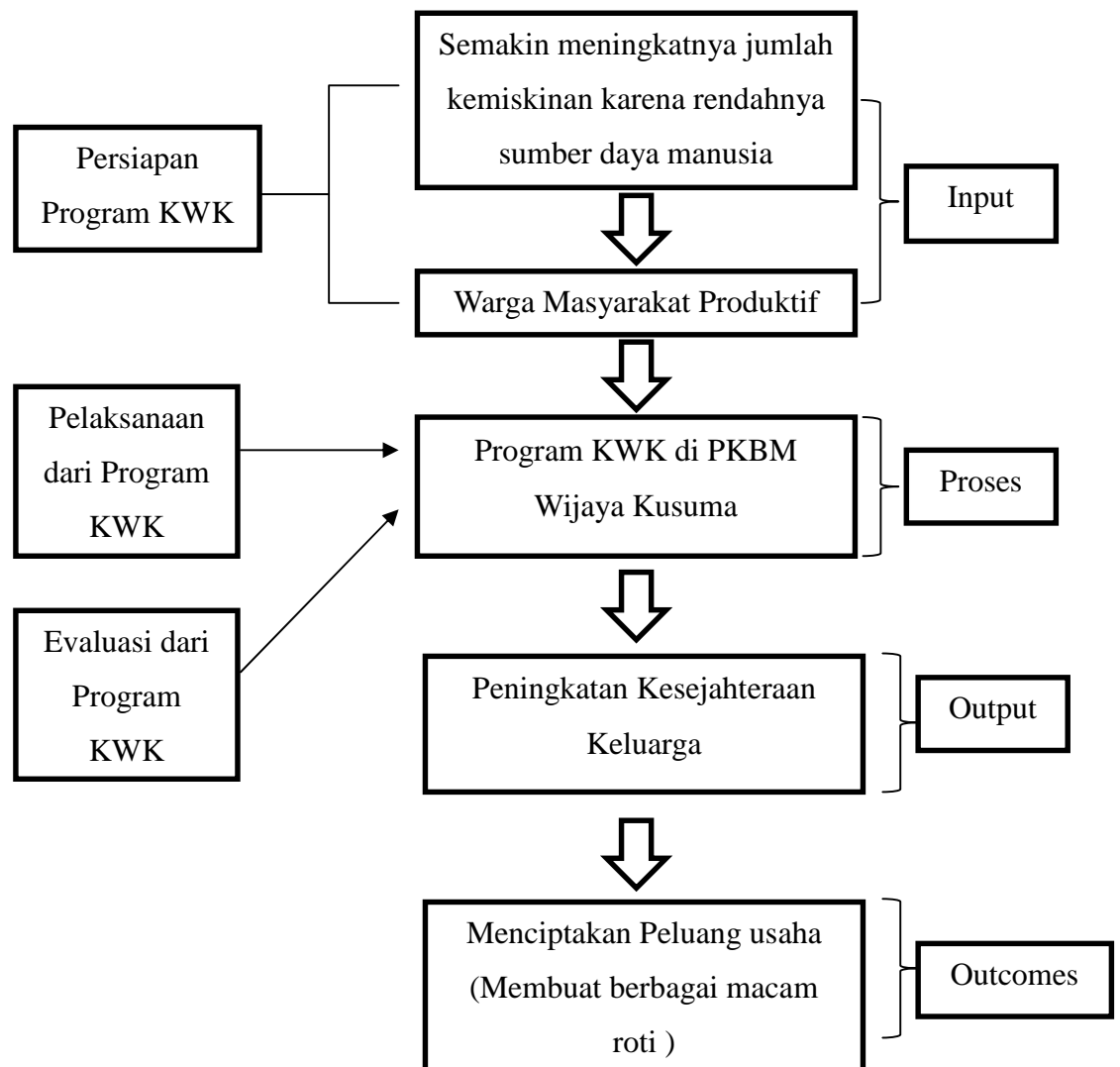
- 1) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga untuk tabungan keluarga
- 2) Biasanya makan bersama paling kurang sehari sekali dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga
- 3) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya
- 4) Mengadakan reaksi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/ 6 bulan
- 5) Dapat memperoleh berita dari surat kabar atau tv atau majalah
- 6) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.

e. Keluarga sejahtera tahap III plus

Yaitu keluarga yang dapat memenuhi kriteria mengembangkan keluarganya yaitu :

- 1) Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materiil
- 2) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/ yayasan/institusi masyarakat.
- 3) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- 4) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- 5) Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.

D. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Keterangan:

Program Kursus Kewirausahaan Kota (KWK) merupakan program pendidikan nonformal yang bergerak pada bidang kewirausahaan yang diselenggarakan untuk memberi kesempatan pada warga masyarakat belajar berwirausaha agar warga masyarakat mendapat ketrampilan dan pengetahuan

dibidang usaha. Pada program KWK ini pemerintah memberi wadah sendiri dalam menangani program KWK tersebut terutama pada instansi atau lembaga pendidikan nonformal.

Penelitian ini proses pelaksanaan program KWK yang dilaksanakan di PKBM Wijaya Kusuma yang merupakan wadah kegiatan pembelajaran KWK atau program pendidikan nonformal pada warga masyarakat dengan mengarah pada potensi-potensi yang dimiliki warga masyarakat atau lingkungan sekitar. Program KWK yang dilaksanakan di PKBM Wijaya Kusuma bertujuan sebagai cara peningkatan keluarga yang ada di daerah Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta yang sebelumnya di daerah tersebut belum ada program yang mengajarkan ketrampilan dalam bentuk usaha.

Peneliti akan menggambarkan implementasi program KWK di PKBM Wijaya Kusuma yang dilatarbelakangi dengan semakin meningkatnya jumlah kemiskinan karena rendahnya sumber daya manusia dengan sasaran warga masyarakat produktif yang menjadi persiapan dari program KWK. Pelaksanaan program KWK menjadi proses serta evaluasi program KWK dilakukan dengan tes individu dan tes kelompok untuk melihat keberhasilan dari program KWK. Hasilnya peningkatan kesejahteraan keluarga bagi peserta didik setelah mengikuti program KWK menjadi output dari program KWK. Outcomes pembelajaran dalam program KWK dapat menciptakan peluang usaha dari hasil dari pembelajaran program KWK yang bisa berupa membuat beranekaragam makanan.

E. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Implementasi program Kursus Kewirausahaan Kota yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi diPKBM Wijaya Kusuma Yogyakarta?
 - a. Bagaimana persiapan dari program KWK diPKBM Wijaya Kusuma?
 - b. Bagaimana pelaksanaan dari program KWK di PKBM Wijaya Kusuma?
 - c. Bagaimana Evaluasi dari program KWK di PKBM Wijaya Kusuma?
2. Bagaimana peningkatan kesejahteraan keluarga peserta didik program KWK di PKBM Wijaya Kusuma Yogyakarta?
 - a. Bagaimana kondisi tempat tinggal peserta didik program KWK di PKBM Wijaya Kusuma?
 - b. Bagaimana pendapatan sehari-hari peserta didik sebelum mengikuti program KWK di PKBM Wijaya Kusuma?
 - c. Bagaimana peningkatan pendapatan sehari-hari peserta didik setelah mengikuti program KWK di PKBM Wijaya Kusuma?
3. Bagaimana faktor Pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program KWK di PKBM Wijaya Kusuma Yogyakarta?
 - a. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung pelaksanaan program KWK di PKBM Wijaya Kusuma Yogyakarta?
 - b. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan program KWK di PKBM Wijaya Kusuma Yogyakarta?